

## Banjir Kepung Banjar Kalsel .....

Dari Halaman 1

Sedangkan rumah yang terdampak, ia menyebutkan ada sekitar 5.206 unit, dan yang masih terdampak sekitar 1.714 unit.

Yayan merinci jumlah kelompok rentan yang terdampak, yakni lansia sebanyak 505 jiwa, balita (310), bayi (166), anak-anak (368), ibu hamil (113), disabilitas (37), dewasa (13).

Sedangkan pengungsi yang mencapai 302 jiwa atau 113 KK, yang terdapat kelompok rentan balita 45 orang, lansia (35), dan dewasa (119).

"Hingga saat ini, personel gabungan dari Pusdlops, Satgas, TRC, TNI, Polri, pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa rutin pengecekan dan pendataan warga yang terdampak, dan selalu memonitor kecamatan yang terdampak banjir," kata Yayan.

Yayan menyampaikan kondisi terbaru di lapangan yang masih terjadi banjir hingga 28 Desember 2025 pukul 09.50 Wita, yakni di

Kecamatan Kertak Hanyar meliputi Desa Simpang Empat dan Kertak Hanyar II, Kecamatan Sungai Tabuk (Desa Lok Buntar, Pembantan, Sungai Bangkal, dan Sungai Tabuk Keramat).

Kecamatan Martapura (Desa Bincau, Bincau Muara, Tunggul Irang, Tunggul Irang Ulu, Tunggul Irang Ilir, Tungkar, Labuan Tabu, Jawa Laut, dan Sungai Sipai). Kecamatan Karang Intan (Desa Awang Bangkal Barat, Awang Bangkal Timur, Karang Intan, Mandi Angin Barat, Mandi Angin Timur, Pasar Lama, Penyambaran, Jingah Habang Ulu, Jingah Habang Ilir, Kiram, Mali-Mali, Mandi Kapau Timur, Mandi Kapau Barat, Pandak Daun, Sungai Alang, Sungai Arfat, Sungai Landas, dan Sungai Asam).

Kemudian di Kecamatan Astambul (Desa Danau Salak, Jati, Kalampaian Tengah, Kalampaian Ulu, Munggu Raya, Pingaran Ilir, dan Pingaran Ulu), Kecamatan Pengaron (Desa Pengaron, Lumpangi, Benteng, Lobang Baru, Lok Tunggul, Atiim, dan Mangkauk).

Dari Halaman 1

dap dampak lingkungan yang serius, mengingat lokasi TPA yang direncanakan hanya berjarak beberapa ratus meter dari permukiman warga.

"Warga Desa Tanjung Rejo menolak keras rencana pembangunan TPA di desa kami. Lokasinya terlalu dekat dengan rumah warga," tegas salah seorang warga dalam pertemuan itu.

Warga juga mengungkapkan kekhawatiran akan pencemaran sumber air bersih dan lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat.

"Saya khawatir akan terjadi pencemaran air warga, belum lagi sampah yang terbawa aliran air saat hujan. Dampaknya bisa sangat luas," ujar

warga lainnya.

Namun suasana forum yang seharusnya menjadi ruang dialog justru berubah mencakam. Warga mengaku Camat Percut Sei Tuan diduga melontarkan pernyataan bernada ancaman, dengan menyebut bahwa warga yang menolak pembangunan TPA dapat dipidanaan.

Pernyataan tersebut sotak menimbulkan ketakutan dan kebingungan di tengah masyarakat. Warga merasa diintimidasi dan hak mereka untuk menyampaikan aspirasi seolah ditekan oleh aparat pemerintah.

"Apakah boleh seorang pejabat menggunakan ancaman pidana kepada warganya hanya karena menyampaikan penolakan?" kata salah satu warga dengan nada kecewa.

Sikap Camat Percut Sei Tuan ini menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, terlebih dalam persoalan yang menyentuh lingkungan dan keselamatan hidup masyarakat.

Jika dugaan ancaman terhadap warga ini terbukti, publik mendesak Bupati Deliserdang untuk segera mengambil tindakan tegas, termasuk memberikan sanksi dan mencopot Camat Percut Sei Tuan dari jabatannya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Deliserdang dalam menjunjung tinggi hak warga, transparansi kebijakan, serta tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. (A-10)

## 500 Hunta untuk Korban Bencana Sumatra .....

Dari Halaman 1

Rosan menyampaikan jumlah tersebut belum sepenuhnya dari yang direncanakan, yakni sebanyak 15 ribu hunian sementara.

Isi laporan Rosan ke Prabowo disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Rosan berkunjung ke rumah Prabowo di Kertanegara, Sabtu (27/12) malam.

"Menteri Rosan menyampaikan setidaknya 500 hunian akan siap pada minggu ini beriringan dengan pembangunan hunian lainnya," kata

Teddy dalam Instagram resmi @sekretariat\_kabinet, Minggu (28/12).

Rosan menyampaikan hunta lainnya akan menyusul diselesaikan. Proses pembangunan terus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan.

"Hunian lainnya juga sedang dibangun oleh BNPB, Kementerian PU serta Kementerian Perumahan," tulis keterangan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Prabowo juga meminta laporan perkembangan mengenai kampung Haji di Kota Makkah, Arab Saudi, terutama terkait titik lokasi menara, luas lokasi serta

pelaksanaan pembangunannya.

Rosan menyampaikan pemerintah Saudi mendukung penuh program tersebut, apalagi setelah Putra Mahkota Mohammed Bin Salman berkomunikasi melalui telepon dengan Prabowo pada 8 Desember lalu.

Menteri Rosan sebelumnya telah 4 kali bertemu dengan Pemerintah Saudi membahas ini. Tujuannya agar seluruh jamaah Haji Indonesia memiliki tempat & fasilitas penginapan nyaman tersendiri saat melaksanakan Ibadah Haji dengan lokasi yang cukup dekat dengan Masjidil Haram.(cnni/js)

## Buruh Siap Demo Berjilid-jilid .....

Dari Halaman 1

Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp5,89 juta per bulan. Terdapat selisih sekitar Rp160 ribu dibandingkan upah minimum yang ditetapkan.

Said Iqbal menambahkan BPS juga menyebutkan biaya hidup di Jakarta mencapai Rp15 juta per bulan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH).

"Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar Rp5,89 juta saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta masih kurang Rp160 ribu. Bahkan kebutuhan minimum tersebut pun tidak mampu dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.

Ketiga, Gubernur DKI Jakarta menjadikan insentif di bidang transportasi, pangan, dan air bersih sebagai alasan kebijakan upah. Padahal, ketiga insentif tersebut tidak berimplikasi terhadap upah minimum karena dinikmati oleh masyarakat umum dan tidak menjadi bagian dari komponen upah minimum.

Selain itu, kata Said Iqbal, insentif tersebut belum diberlakukan sejak lima tahun lalu, tepatnya pada masa Gubernur Anies Baswedan, sehingga tidak relevan dijadikan dasar penetapan UMP 2026.

KSPI mengklaim bertanya langsung kepada buruh di perusahaan-perusahaan di Jakarta, di antaranya di kawasan Cilincing dan Pulo Gadung, terkait penerimaan insentif pangan,

transportasi (Jaklingko dan Transjakarta), serta air bersih. Hasilnya, para buruh menyatakan tidak menerima insentif tersebut. Dari total sekitar 300 karyawan, hanya sekitar 15 orang yang menerima.

"Artinya, hanya sekitar 5 persen buruh yang menerima insentif tersebut, sementara upah minimum berlaku bagi seluruh pekerja. Ini jelas tidak masuk akal," ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut, KSPI menuntut agar Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadikan setara dengan KHL, yakni Rp5,89 juta per bulan.

KSPI juga menuntut kenaikan UMSK DKI 2026 sebesar 2-5 persen di atas KHL, bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama, melainkan dari nilai KHL sesuai karakteristik sektor industri.

Adapun terkait penetapan UMSK 2026 se-Jawa Barat, serikat buruh mengatakan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat telah mengeluarkan rekomendasi resmi nilai UMSK dan menyampainkannya kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Namun, menurut Said Iqbal, rekomendasi tersebut justru dicoret, diubah, dikurangi, bahkan dihilangkan oleh Dedi Mulyadi. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSK.

kita juga) pura-pura tuli dan melanjutkan aksi mengunduli hutan.

Inilah klimaksnya. Ketika langit akhirnya melepas janjiannya (yang sudah diumumkan BMKG 72 jam sebelumnya), dan tanah yang sudah batok (yang sudah diidentifikasi KRB) tak lagi sanggup menahan air, terjadilah "Pesta Bencana." Lalu, dimulailah "Drama Tanggap Darurat," sebuah tayangan realitas paling populer. Ratingnya selalu tinggi. Adegan-adegannya standar.

Ada adegan evaluasi dengan perahu karet, alam bak penuh dengan air mata dan pelukan, diiringi narasi reporter yang dramatis.

Lalu ada adegan kunjungan pejabat dan pesohor. Sang menteri atau gubernur datang dengan pakaian yang selalu lebih bersih daripada air banjir di lokasi. Kalimat wajib, "Kami akan kaji lebih dalam dan koordinasi dengan semua pihak." (Kajian yang kesekian kalinya).

Adegan wawancara pakar pun meledek. Inilah monolog intelektual puncak. Dengan grafik dan peta, sang pakar akan mengatakan, "Ini adalah buah dari kombinasi faktor meteorologis ekstrem dan degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan." (Alih fungsi lahan = hutan jadi sawit, sawit jadi tambang, tambang jadi kubangan, kubangan jadi banjir).

Penonton di rumah manggut-manggut, "Wah, pintar sekali pak profesornya," lalu beralih channel.

Setelah banjir surut dan longsor mengering, kita masuk ke fase "Lupa dan Ulangi". Bantuan logistik telah dibagikan, laporan pertanggungjawaban dana tanggap darurat telah dibuat (dengan format yang sangat rapi), dan foto-foto pahlawan sudah diunggah di berbagai plat-

Menurutnya, alasan potensi PHK yang digunakan dinilai tidak berdasar. Sebab pada tahun sebelumnya, setelah adanya intervensi pemerintah pusat, tidak terjadi PHK sebagaimana yang dikhawatirkan. Contohnya, UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi dicoret dengan alasan perusahaan tidak mampu, meskipun perusahaan-perusahaan raksasa seperti Epson dan Panasonic beroperasi di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, KSPI bersama buruh Jawa Barat menuntut agar Dedi Mulyadi menetapkan seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat dan merevisi Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK 2026.

Terkait langkah lanjut, KSPI menyiapkan dua langkah utama. Pertama, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan penetapan UMSK Jawa Barat, serta mengkaji gugatan serupa di sejumlah provinsi lain, termasuk Sumatera Utara.

Kedua, melakukan aksi besar-besaran. Aksi akan dilakukan serentak selama dua hari, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara atau DPR RI.

Jika aspirasi besar dan lusa tidak didengar, KSPI menegaskan demo berjilid-jilid akan dilanjutkan pada Januari, Februari, dan seterusnya.

"Bahkan berpotensi meluas menjadi aksi solidaritas nasional," pungkas Said Iqbal.(cnni/js)

form berita atau sekadar cerita.

Lalu, aktivitas yang menjadi akar masalah—pembukaan lahan baru, penebangan, pembangunan di bantaran sungai—akan kembali dilakukan, seringkali dengan intensitas lebih besar untuk "mengejar kerugian". KRB edisi terbaru pun mulai disusun, dengan data kerusakan terburu yang lebih parah dari sebelumnya. Siklus itu suci dan tak terganggu.

Kita seolah telah menjadiseniman repetisi yang ulang. Kita mengulang kesalahan yang sama, dengan presisi yang tinggi, dan selalu bertanya dengan wajah polos setelahnya, "Kok bisa ya terjadi lagi?"

Mungkin sudah saatnya kita akui bahwa ini bukan lagi soal kegagalan sistem, tapi tentang adopsi sebuah tradisi baru yang bernama "Tradisi Bencana Terkelola". Kita begitu ahli dalam merespons bencana, tapi alergi dalam mencegahnya.

Pencegahan itu tidak fotogenik, tidak dramatis, dan tidak menghasilkan proyek banjir-dana yang cepat cair.

Jadi, selamat datang di Sumatera, tempat di mana peringatan adalah bahan latar belakang, laporan adalah artefak museum, dan bencana adalah tontonan rutin.

Sampai kita memutuskan untuk mengubah ritual "Tanggap Darurat" menjadi ritual "Tanggap Sebelum Darurat", upacara bendera putih-lambang siaga satu—ini akan terus berkibar di langit seluruh Sumatera, diiringi deru helikopter dan lengkingan sirine, sebagai soundtrack tetap dari sebuah pulau yang seolah-olah dengan suara karet yang terus bergerak mundur ke dalam siklus air mata dan lumpurnya sendiri.(\*)

## Kejagung Diminta Usut ....

Dari Halaman 1

Surat tersebut menindaklanjuti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP) sejak Desember 2024.

"Kami sangat menyesalkan karena telah dihentikannya penanganan kasus dugaan korupsi tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal telah menetapkan tersangka," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Minggu (28/12).

"Kami berharap agar Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus dapat memberikan atensi dan berkenan untuk menangani kasus dugaan korupsi tersebut secara tuntas," imbuhnya.

Laporan ke Kejaksaan Agung termuat dengan nomor perihal: 1220/MAKI-JAMPIDSUS/XII/2025, perihal laporan dugaan korupsi bidang pertambangan.

Surat laporan tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung.

Berdasarkan temuan MAKI, Boyamin menuturkan perkara dugaan korupsi penerbitan izin pertambangan pada tahap eksplorasi, eksplorasi, hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Izin usaha pertambangan tersebut diberikan kepada 17 perusahaan pertambangan nikel tahun 2017 oleh Bupati Konawe Utara saat itu, Aswad Sulaiman.

Dugaan korupsi diduga dilakukan melalui percepatan pemberian izin. Dalam satu hari, Aswad disebut berhasil memberikan izin untuk 17 perusahaan tersebut.

"Atas upaya percepatan pemberian izin tersebut Bupati Aswad Sulaiman diduga mendapatkan suap/gratifikasi senilai Rp13 miliar. Bawa atas pemberian izin tersebut negara mengalami kerugian mencapai Rp2,7 triliun," kata Boyamin. (cnni/js)

## Gempa Guncang .....

Afrida mengutip Antara.

Ia mengaku merasakan dua kali getaran gempa saat dirinya bersama keluarga tengah berkumpul di dalam rumah.

Pada gempa pertama, ia dan keluarga masih bertahan di dalam rumah sembari menyaksikan televisi.

Tak lama, ia merasakan gempa susulan yang cukup besar dari gempa pertama.

"Saya dan keluarga langsung keluar dari rumah, karena khawatir rumah ambruk," katanya.

Gempa bumi melanda Agam dengan kekuatan ber-magnitudo 4,6 Lok: 0.17 LS - 100.10 BT (18 kilometer Timur Laut Agam-Sumbar), kedalaman 10 kilometer pada pukul 09.11.34 WIB.

Setelah itu bermagnitudo 4,7 pada pukul 09.15.46 WIB.

Gempa terasa hingga Bukittinggi

Getaran gempa dirasakan cukup kuat masyarakat di sejumlah wilayah. Berdasarkan parameter skala MMI, gempa dirasakan III-IV MMI di Agam dan Bukittinggi, serta II-III MMI di Padang Panjang dan Payakumbuh. Pada skala itu, getaran dirasakan jelas